

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Setiyono, B. 2018. *Model & Desain Negara Kesejahteraan*. Bandung: Nuansa Cendekia
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D Cetakan ke-20*. Bandung: Afabeta.
- Wignsoebartio, S. 2020. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.
- Marzuki, P. M. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Riwanto, A. 2018. *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia Pasca Reformasi*. Sukoharjo: Oase Group.

Jurnal

- Hadiyono, V. 2020. "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya." *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 01, No. 01.
- Handika, V. dan Rahmadani Yusran. 2020. "Implementasi Program Kotaku dalam Upaya Mengatasi Pemukiman Kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota." *Journal of Civic Education*, Vol. 03, No. 03.
- Hari, N. A. "Jamsostek dan Negara Kesejahteraan." *Pakuan Law Review*, Vol. 01, No. 02.
- Sukmana, O. 2016. "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)." *Jurnal Sospol*, Vol. 02, No. 01.
- Suryani, A.S. 2012. "Tantangan Implementasi Konsep Eco-Settlement Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman." *Jurnal DPR RI*, Vol. 02, No. 01.
- Jailani, M. 2011. "Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia." *Syiar Hukum*, Vol. 13, No. 01

- Silvia, J.Y., & Angraini, R. 2018. "Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Panti Asuhan Aisyiah Kabupaten Agam." *Journal of Civic Education (JCE)*, Vol. 01, No. 02.
- Saparwadi, & Jayadi, S. 2018. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat untuk Kesejahteraan Keluarga di Demangan Yogyakarta." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol.42, No. 01.
- Ardinata, M. 2020. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 20.
- Rusnan. 2014. "Konsep Negara Hukum dalam Hubungan Kekuasaan Freiss Ermessen dalam Welfare State." *Jurnal IUS*, Vol. 02, No. 04.
- Hadiyono, V. 2020. "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya." *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 01, No. 01.
- Hamdani. 2020. "Negara Sejahteraan dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Mabsut*, Vol. 14, No. 01.
- Badruzaman, D. 2018. "Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 01, No. 02.
- Junaidi, M., & Indah, D.N. 2020. "Pemilihan Presiden Ideal Melalui Demokrasi Kerakyatan Berdasarkan Nilai-Nilai Keislaman." *Law and Justice*, Vol. 05, No. 01.
- Munawaroh, N. 2019. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis." *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 01. No. 02.
- Soares, A., Nurpeatiwi, R., & Makmur. M. 2015. "Peranan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 04, No. 02.
- Hasyim, M., & Mardhatillah, S.R. 2020. "Asas Otonomi Daerah dalam Penegakan Hukum Terhadap Izin Lingkungan." *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 05, No. 01.
- Pitono, A. 2012. "Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam

- Penyelenggaraan Pemerintahan.” *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 03, No. 01.
- Dewirahmadanirwati. 2018. “Implementation of Regional Autonomy in Realizing Good Governance in the West Sumatra Region.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic (JIPS)*, Vol. 02, No. 03.
- Maulidiah, S. & Husnah, A. 2018. “Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak.” *Jurnal Wedana*, Vol. 04, No. 02.
- Sutono. 2021. “Guarantee of Social Needs in Islamic Economic Perspective.” *Jurnal Inovasi Penelitian (JIP)*, Vol. 01, No. 08.
- Pereira, L., Supriyono, B., & Makmur, M. 2015. “Perencanaan Pembangunan Permukiman sebagai Upaya Peningkatan Kelayakan Hidup Masyarakat.” *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 04, No. 02.
- Fitria, N., & Setiawan, R.P. 2014. “Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat.” *Jurnal Teknik Pomits*, Vol. 03, No. 02.
- Hennigusnia, & Kurniawati, A. 2021. “Tinjauan Konstitusional Terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial” *Jurnal Ketenagakerjaan*, Vol. 16, No. 02.
- Riskiyono, J. 2015. “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan” *Aspirasi*, Vol. 06, No. 02.
- Solechan. 2019. “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik” *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 02, No. 03.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/2016
tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penataan
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041

Surat Keputusan Bupati Blora Nomor : 663/886/2014 Tentang Penetapan
Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Blora

Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum
Dan Perumahan Rakyat Nomor: 40/SE/DC/2016

Skripsi

Widuri, A.R. 2019. “Pemeliharaan Saluran Drainase Primer Untuk Pencegahan
Bencana Banjir Di Kota Padang.” Skripsi, Padang: Fakultas Hukum
Universitas Andalas Padang.

Seminar

Arief, I.M.S. 2018. “Peran Pemerintah Provinsi dalam Penanganan Kumuh
Berdasarkan Perpres UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”.
Seminar Kementrian dalam Negeri Kota Samarinda, 18-20 April 2018.

Website

Disperkimtan.Bone.go.id. *Pengertian Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)*.

Diakses hari Minggu, 26 Desember 2021 pukul 13.13

WIB. <https://disperkimtan.bone.go.id/2019/09/10/pengertian-program->

[kota-tanpa- kumu h-kotaku/](https://disperkimtan.bone.go.id/2019/09/10/pengertian-program-kota-tanpa-kumu-h-kotaku/)

Blorakab.go.id. *Gambaran Umum Kabupaten Blora*, Diakses pada hari Kamis, 24

Maret 2022 pukul 11.51 WIB.

<https://www.blorakab.go.id/index.php/public/profil/index/164>

Sarira, I. Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Negara Kesejahteraan, Diakses pada hari Selasa, 7 Juni 2022 pukul 14.18 WIB. <https://business-law.binus.ac.id/2019/07/08/kebijakan-pemerintah-dalam-penyelenggaraan-sistem-jaminan-sosial-dalam-perspektif-negara-kesejahteraan/>

Radar Kudus, *Lima Kecamatan di Blora Belum Bebas Wilayah Kumuh, Mana Saja?*, Diakses hari Selasa, 7 Juni 2022 Pukul 15.39 WIB. <https://today.line.me/id/v2/article/ervwrB>